



**PROPOSAL  
SKIM RISET DASAR  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2020**

**SUB TEMA PENELITIAN: *PENGEMBANGAN SDM***

**SUB TOPIK PENELITIAN: *PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENDIDIKAN***

**JUDUL PENELITIAN:  
*PRAKTEK SCHOOL PEACEBUILDING DI SMA/ SMK KOTA PADANG***

**TIM PENGUSUL**

<b>Anita Afriani Sinulingga, S.IP.,M.Si. (NIDN. 0013048206)</b>	<b>(Ketua)</b>
<b>Putiviola Elian Nasir, SS., MA (NIDN. 0025068705)</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>M. Rakha Surya Lesmana (No. BP 1610852011)</b>	<b>(Mahasiswa)</b>
<b>Ilman Syarif Masri (No. BP 1610853013)</b>	<b>(Mahasiswa)</b>
<b>Intan Zaleha Permata Sari (No. BP 1610852003)</b>	<b>(Mahasiswa)</b>

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Padang  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL RISET DASAR UNIVERSITAS ANDALAS**

Judul Penelitian : Praktik *School Peacebuilding* di SMA/ SMK Kota Padang

Skim : Riset Dasar

Sub Tema Penelitian : Pengembangan SDM

Sub Topik Penelitian : Pengembangan SDM melalui Pendidikan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Anita Afriani S, S.IP., M.Si. (P)

b. NIDN : 0013048206

c. ID Sinta : 6013938

d. ID Goggle Scholar : WdBulUAAAAAAJ

e. Prodi, Fakultas : Ilmu Hubungan Internasional

f. Nomor HP : Universitas Andalas

g. Alamat surel (e-mail) : anitaafriani@soc.unand.ac.id, nanisinulingga@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Putiviola Elian Nasir, SS., MA

b. NIDN : 0025068705

c. Prodi, Fakultas : Ilmu Hubungan Internasional, ISIP

Anggota Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : M. Rakha Surya Lesmana

b. No. BP : 1610852011

c. Prodi, Fakultas : Ilmu Hubungan Internasional, ISIP

Anggota Mahasiswa (2)

a. Nama Lengkap : Ilman Syarif Masri

b. No. BP : 1610853013

d. Prodi, Fakultas : Ilmu Hubungan Internasional, ISIP

Anggota Mahasiswa (3)

a. Nama Lengkap : Intan Zaleha Permata Sari

b. No. BP : 1610852003

c. Prodi, Fakultas : Ilmu Hubungan Internasional, ISIP

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 30.000.000,-

Biaya Penelitian

- Diusulkan ke Unand : Rp. 30.000.000,-

- Dana internal Fak/ PPs : Rp. 0,-


- Dana institusi lain : Rp. 0,-

Biaya Luaran Tambahan : Rp. 0,-

Mengetahui,  
Dekan

  
Dr. Alfian Miko, M. Si  
NIP. 196206211988111001

Padang, 23 Maret 2020  
Ketua Peneliti,

  
Anita Afriani S, S. IP, M. Si  
NIP. 198204132008122002



**LAPORAN KEMAJUAN  
SKIM RISET DASAR  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2020**

**SUB TEMA PENELITIAN: *PENGEMBANGAN SDM***

**SUB TOPIK PENELITIAN: *PENGEMBANGAN SDM MELALUI PENDIDIKAN***

**JUDUL PENELITIAN:  
*PRAKTEK SCHOOL PEACEBUILDING* DI SMA/ SMK KOTA PADANG**

**TIM PENGUSUL**

<b>Anita Afriani Sinulingga, S.IP.,M.Si. (NIDN. 0013048206)</b>	<b>(Ketua)</b>
<b>Putiviola Elian Nasir, SS., MA (NIDN. 0025068705)</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>M. Rakha Surya Lesmana (No. BP 1610852011)</b>	<b>(Mahasiswa)</b>
<b>Ilman Syarif Masri (No. BP 1610853013)</b>	<b>(Mahasiswa)</b>

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hingga saat ini, peradaban umat manusia cenderung selalu diwarnai dengan perdamaian dan peperangan. Sebagai bangsa yang hidup di alam demokrasi, interaksi di setiap sektor kehidupan, baik politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sektor lainnya, tidak bias menghindari konflik. Khususnya di sektor pendidikan, dengan mudah disebutkan kasus-kasus konflik atau kekerasan yang terjadi di sekolah atau antar sekolah. Konflik tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan misalnya konflik antar murid, antar guru, murid-guru, pihak sekolah-lingkungan sekitar sekolah, atau murid antar-sekolah. Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi adalah tawuran antarsiswa, baik yang berasal dari sekolah yang sama atau beberapa sekolah berbeda. Perkelahian kelompok siswa ini tidak jarang menimbulkan korban luka bahkan meninggal dunia. Bagian yang memprihatinkan dari kekerasan tersebut adalah kecenderungannya untuk melembaga dan terpola bahkan berkelahi menjadi tradisi dengan sekolah lain selama puluhan tahun (Panggabean, 2008).

Akan tetapi, terdapat banyak jenis konflik selain tawuran kelompok siswa yang terjadi di sekolah. Walaupun tingkat kekerasannya lebih rendah dari perkelahian kelompok, dan seringkali lebih bersifat pribadi, konflik di sekolah dapat mengganggu pihak yang berkonflik dan mempengaruhi suasana sekolah sebagai tempat belajar yang aman. Perilaku tersebut diatas memberikan sinyal perilaku dehumanisasi yang bertujuan untuk menghilangkan harkat manusia. Pada level yang lebih tinggi, dehumanisasi bisa berujung kematian, seperti kasus Ahmadiyah di Cikeusik, atau genosida di Jerman, Rwanda, dan Yugoslavia. (Firawati, 2008).

Studi Ilmu Hubungan Internasional sendiri yang mengklaim bahwa agenda utama pembelajarannya adalah mewujudkan perdamaian dunia, namun kelas-kelas HI klasik lebih banyak membicarakan narasi-narasi mengenai peperangan. Lebih ringkas, studi HI klasik, belajar damai dengan perang. Kajian-kajian mengenai perang bahkan melanggengkan pemikiran klasik yang tetap eksis “si vis pacem para bellum-jika ingin damai maka bersiaplah untuk perang”. Pemikiran tersebut sangat dipengaruhi oleh perspektif Realis yang menjadi perspektif dominan dalam HI terutama pada masa Perang Dunia Kedua (1939-1945) dan Perang Dingin (1950-1990). Realisme menawarkan proposisi-proposisi yang mendekatkan teori dengan

praktik HI sehingga para politisi dapat memberikan justifikasi teoritis bagi kebijakan luar negeri maupun domestik yang mereka lakukan (Hadiwinata, 2017 hal 103). Dalam situasi anarkis yang ditandai dengan ketiadaan pemimpin dunia, maka masing-masing negara harus memperjuangkan kelangsungan hidupnya melalui pembangunan kekuatan militer. (Hadiwinata, 2017 hal 102).

Pernyataan tersebut Panggabean dkk (1997) memberikan kritik terhadap kajian klasik Ilmu Hubungan Internasional yaitu masalah perang dan damai. Menurut Panggabean, untuk mempelajari studi tersebut, fokus telaah HI lebih menitikberatkan pada kajian perang misalnya apa yang menyebabkan perang, bagaimana mencegahnya dan bagaimana menghentikan perang. Ilmu HI klasik cenderung memaknai perdamaian sebagai ketiadaan perang, bukan sesuatu yang dikaji terpisah dari perang. Panggabean juga menyebutkan bahwa “Jika kita ingin damai, maka kita harus belajar tentang perdamaian-bukan perang.” Pemikirannya sejalan dengan pemikiran Kusumaningrum (2017) yang menyatakan “*si vis pacem cole justitiam- jika ingin damai, mari menyemai keadilan*”

Berbagai laporan mengenai konflik kekerasan atau tindakan kekerasan di sekolah penting untuk dipertanyakan mengenai bagaimana pengelolaan konflik atau upaya menyelesaikan konflik di sekolah. Pertanyaan selanjutnya yang bisa diberikan adalah apakah sistem pendidikan nasional telah menanamkan sikap-sikap kemanusiaan. Panggabean (2015) menyebutkan pendidikan adalah pencegahan konflik dan kekerasan yang terbaik. Hal ini dimungkinkan karena adanya peluang untuk merubah sikap kearah yang lebih positif, tidak terkecuali sikap merespon konflik dan kekerasan. Pendidikan hadir untuk mendorong proses-proses yang mendukung perdamaian dan membatasi peluang-peluang yang mengarah pada peperangan/ konflik. Pendidikan yang menitikberatkan pada perdamaian dan resolusi konflik dirancang untuk melawan dehumanisasi. Pendidikan yang berorientasi pada perdamaian dan resolusi konflik diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang humanis (Firawati, 2008). Dalam lingkungan sekolah, *Peaceable school* (sekolah yang damai) dan *peaceable classroom* (kelas yang damai) akan membawa rasa aman bagi seluruh civitas akademika sekolah sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran (Panggabean, 2017).

Sejumlah kekerasan yang terjadi di sekolah menunjukkan bahwa sekolah memiliki berbagai persoalan dalam menghadapi konflik. Ketika konflik diselesaikan

dengan kekerasan, asumsinya nilai dan praktik nir-kekerasaan belum diterapkan di sekolah. Penelitian ini bermaksud memberikan alternatif pemikiran dalam kajian konflik dalam studi Ilmu HI klasik yang mengatakan bahwa perang adalah jalan normal menuju perdamaian. Lebih lanjut penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis akar dan bentuk konflik/ kekerasan baik struktural maupun kultural yang terjadi di sekolah. Hasil analisis tersebut penting dalam memetakan konflik di sekolah yang melibatkan berbagai aktor yang ada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya hasil pemetaan tersebut dapat diketahui bagaimana bentuk pengelolaan konflik dan resolusi konflik yang selama ini diterapkan di sekolah, apakah membawa perdamaian jangka panjang atau hanya untuk sementara/jangka pendek. Berangkat dari temuan penelitian tahap ini, pada tahapan penelitian selanjutnya dapat ditemukan model pengelolaan konflik berbasis sekolah yang sesuai dengan kondisi eksisting sekolah.

## **1.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka pengkajian ini difokuskan untuk dua tujuan penting yaitu:

1. Menemukan pemetaan konflik di sekolah yang melibatkan seluruh civitas akademika sekolah dan masyarakat sekitar sekolah
2. Menganalisis model pengelolaan konflik yang telah diterapkan di sekolah dengan mengaplikasikan beberapa komponen pengelolaan konflik berbasis sekolah
3. Melalui operasionalisasi konsep tersebut di atas akan diketahui akar konflik yang terjadi di sekolah

## **1.3 Urgensi Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keutamaan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam studi manajemen dan resolusi konflik. Penelitian ini akan memberikan alternatif cara berpikir untuk mencegah perang dan melahirkan perdamaian terhadap kajian klasik dalam studi HI. Jika penstudi HI sebelumnya, khususnya para kaum Realis, membenarkan perang sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian, penelitian ini meyakini bahwa damai akan tercapai jika

manusia belajar damai. Damai akan tercapai jika pengelolaan dan penyelesaian konflik dilaksanakan dengan nilai dan praktek nir-kekerasan.

Lebih jauh praktek pengelolaan konflik nir-kekerasan akan membawai damai, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Damai positif cenderung menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, sementara jenis damai yang kedua menghasilkan penjangkauan penanganan konflik dalam jangka panjang. Ketika konflik dan kekerasan di sekolah terjadi secara berulang maka penting untuk menganalisis akar konfliknya agar dapat diterapkan model resolusi konflik yang tepat. Resolusi konflik sendiri cenderung menghasilkan damai dalam jangka panjang sementara pengelolaan konflik lebih bersifat jangka pendek dalam penyelesaian konflik. Hal ini tidak berarti resolusi konflik lebih baik daripada pengelolaan konflik namun keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Strategi pengelolaan konflik dibutuhkan untuk mengatasi konflik pada saat itu juga agar dampaknya tidak menjadi lebih parah, sementara resolusi konflik dipakai untuk mengatasi akar konflik/ persoalan.

Meskipun konflik adalah hal yang bersifat alamiah dan tidak bisa dihindarkan dimana pun termasuk sekolah, namun konflik apapun bentuknya konflik jika tidak dikelola bahkan ditemukan model resolusinya, maka akan berakibat pada hilangnya rasa aman bagi civitas akademika sekolah yang menyebabkan terganggunya kualitas pembelajaran di sekolah. Fenomena tersebut harus menjadi perhatian serius, sebab dunia pendidikan merupakan sektor vital negara dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkarakter. Hasil analisis penelitian ini akan berupa analisis yang komprehensif mengenai bagaimana sekolah mengelola konflik atau bahkan meresolusi konflik. Dengan ditemukannya akar konflik akan menjadi *lesson learned* untuk menemukan model pengelolaan konflik dan resolusi konflik yang tepat dan aplikatif bagi sekolah.

#### **1.4 Target Temuan**

Target temuan ini adalah memberikan kontribusi konkret terhadap model pengelolaan dan resolusi konflik berbasis sekolah. Sebuah model alternatif yang memberi variasi pilihan kepada sekolah. Sekaligus invensi teoritik ini memberi koreksi terhadap model manajemen dan resolusi konflik yang sudah ada namun lebih banyak terfokus kepada perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi bisnis komersial. Temuan ini juga memperkaya khazanah studi humanitarian karena

pengelolaan dan penyelesaian konflik dilakukan oleh aktor yang menjaga martabat manusia atau humanis.

Hasil penelitian ditarget memberikan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan terkait di sekolah dan kota Padang khususnya, secara umum Sumatera Barat mengenai pengelolaan konflik berbasis sekolah yang efektif. Hasil penelitian ditargetkan akan didiseminasi dalam seminar nasional dan internasional dan dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan beberapa luaran iptek sebagaimana dalam tabel rencana target capaian pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahun 2020-2022**

No.	Jenis Luaran				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS <sup>0</sup>	TS+1	TS+2
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional Bereputasi	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	√
		Nasional Terakreditasi	<i>Submitted</i>	Tidak Ada	√	√	-
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeks	Sudah dilaksanakan	Tidak Ada	√	√	√
		Nasional	Sudah dilaksanakan	Tidak Ada	√	√	-
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
		Nasional	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	√
4	Visiting Lecturer	Internasional	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
		Paten Sederhana	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
		Hak Cipta	Draf	Draf	√	√	√
		Merek Dagang	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
		Rahasia Dagang	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
		Desain Produk Industri	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
		Indikasi Geografis	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
		Perlindungan Varietas Tanaman	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
6	Teknologi Tepat Guna	Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
			Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
7	Model/ purwarupa/ Desain/ Karya Seni/ Rekayasa Sosial		Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-
8	Bahan Ajar		Tidak Ada	Draf	√	√	√
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Skala 1	Tidak Ada	-	-	-

## **BAB 2. RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Penelitian yang diusulkan sejalan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Andalas tahun 2017-2020 dengan tema utama Pengembangan SDM dan Karakter



Bangsa khususnya pada sub tema Ekonomi dan SDM dengan sub topik Pendidikan dan Pengendalian Kependudukan. Tema dan klaster yang menjadi rujukan penelitian menempatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan. Kajian tentang praktik *school building* di sekolah merupakan salah satu topik unggulan, khususnya dalam pembangunan karakter bangsa. Hasil penelitian nantinya dapat menghasilkan analisis berupa akar konflik dan bentuk-bentuk konflik di sekolah. Melalui analisis tersebut akan menjadi basis untuk menemukan strategi pengelolaan konflik berbasis sekolah. Ketika manusia mampu meresolusi konflik dengan cara-cara nir-kekerasaan berarti manusia tersebut telah menjunjung humanisme.

Temuan penelitian berupa analisis akar dan bentuk konflik di sekolah diharapkan menjadi bentuk sumbangsih kepada keimuan Hubungan Internasional maupun pihak-pihak pengampu kepentingan yang terkait dengan dunia pendidikan. Hal ini diharapkan memenuhi kontribusi penelitian yang diharapkan oleh Universitas Andalas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan Daerah serta IPTEK dalam bidang SDM (Sumber Daya Manusia), ekonomi, pendidikan, karakter budaya bangsa, serta sistem hukum dan politik nasional. Tujuan penelitian yang juga telah disebutkan pada bagian pendahuluan diharapkan juga harapan intitusi yang tertulis dalam Statuta Universitas Andalas untuk melaksanakan kegiatan penelitian dalam konteks penelitian ini adalah bentuk penelitian dasar. Penelitian tersebut dilaksanakan untuk mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; serta menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.

### **BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA**

Terdapat sekurangnya dua perspektif teori yang dipilih sebagai *state of the art* dalam implementasi kegiatan penelitian Riset Dasar ini. Di bagian pertama akan diuraikan Teori Pilar Konflik sementara pada bagian kedua akan dijelaskan Teori Peacebuilding. Bagian ini juga dilengkapi dengan *roadmap* penelitian yang sudah dilakukan serta orientasi ke tujuan.

### 3.1 Teori Pilar Konflik

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang hampir mirip tapi berbeda. Konflik adalah sebuah ketimpangan kondisi atau ketidaksesuaian satu sama lain baik dalam pola pikir maupun tindakan, sedangkan kekerasan merupakan tahapan ketika konflik tidak mampu dikendalikan dengan baik. Sandole menjabarkan mengenai definisi konflik sebagai sebuah proses yang ditandai dengan tahapan inisiasi, eskalasi, *controlled maintenance*, de-eskalasi (Sandole, 2003). Melalui pendefinisian tersebut, konflik dibedakan menjadi tiga yakni *Latent Conflicts (Pra-MCPs)*, *Manifest Conflict (MCPS)* dan *Aggressives Manifest Conflict Process (AMCPs)*.

*Latent Conflicts* diterjemahkan sebagai konflik yang sedang berkembang namun belum terungkap dengan cara yang dapat diamati bahkan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik itu sendiri. Sedangkan *Manifest Conflicts Process* adalah Konflik yang sedang berkembang dan telah bisa diamati namun belum pada tahapan adanya kekerasan. Sedangkan *Aggressives manifest conflict process* adalah konflik yang telah dieskalasi dari MCPs menuju adanya tingkat kekerasan didalam konflik. Selanjutnya Sandole menjelaskan mengenai tiga pilar untuk menganalisis dan menemukan resolusi konflik yang tepat pada berbagai level. Tiga pilar ini antara lain Pilar 1 menjelaskan mengenai karakteristik konflik dari berbagai macam konflik. Pilar 2 menjelaskan tentang penyebab dan kondisi konflik. Pilar 3 menjelaskan ancaman intervensi dan implementasi penyelesaian konflik (Sandole, 2003).

#### a. Pilar 1: Elemen konflik

Pilar ini dibagi menjadi elemen yang menjadi komponen dalam konflik. Elemen tersebut meliputi pihak, isu, tujuan, cara, orientasi penyelesaian konflik dan lingkungan konflik. Pihak yang berkonflik dapat dibagi menjadi enam pihak meliputi individu, kelompok, organisasi, masyarakat, negara dan regional. Dari berbagai pihak yang berkonflik, konflik juga bisa dibagi menjadi konflik personal, konflik keluarga, konflik pengaturan buruh, konflik lingkungan, konflik identitas yang meliputi (etnik, ras, agama dan gender), dan konflik internasional (civilizational). Pada tipe konflik yang dipaparkan, dijelaskan juga level konflik yang terjadi. Misalnya pada konflik personal, akan ada dua kemungkinan level konflik yakni intra-psikis atau inter-personal dengan unit analisis individu. Pada konflik keluarga, kemungkinan terjadi konflik pada level inter personal dan inter-group dengan unit analisis individu dan kelompok. Sedangkan pada konflik manajemen

buruh merupakan konflik pada tingkat inter-organisasi dengan unit analisis organisasi. Pada konflik lingkungan, tingkat konfliknya adalah antara kelompok-organisasi, intra-negara dan inter-negara dengan unit analisis meliputi kelompok, organisasi, masyarakat dan negara. Pada konflik identitas, level konflik berada pada antar kelompok dan intra/inter-negara dengan unit analisis kelompok, masyarakat, dan negara. Konflik internasional memiliki level konflik di tingkat negara dengan unit analisis *civilization*. Level dan unit analisis konflik bisa saja meluas dari satu ke yang lainnya, maka dari itu peneliti harus jelas dalam menentukan unit dan level konflik yang akan menjadi fokus kajian pada saat tersebut.

Isu di definisikan sebagai alasan satu pihak untuk melancarkan konflik terhadap kelompok lainnya. Sandole menjelaskan isu ke dalam dua garis besar konflik. Pertama konflik struktural dan non-struktural. Kedua konflik realistik dan non-realistik. Konflik struktural biasanya berkuat pada isu mengenai perubahan didalam sebuah tatanan, atau mempertahankan mempertahankan sistem politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sedangkan konflik non-struktural lebih kepada mengakhiri sebuah sistem yang ada misalnya pengakuan terhadap hak-hak kaum minoritas dalam sebuah tatanan untuk masuk ke dalam konstitusi negara. Konflik realistik dan non-realistik secara sederhana diartikan sebagai konflik yang didasarkan pada isu yang jelas dan realistik untuk konflik realistik seperti persoalan konflik teritorial. Sedangkan untuk konflik non-realistik biasanya didasarkan pada isu yang menjadi manifestasi kebutuhan satu kelompok terhadap kelompok lainnya agar mampu tercapai.

Terdapat dua tujuan utama dalam sebuah konflik. Tujuan tersebut adalah mengubah status quo yang sudah ada sejak lama, atau menjaga status quo yang sudah ada dengan beberapa pilihan serta cara yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam konflik biasanya dibagi menjadi dua cara yakni dengan kekerasan dan non-kekerasan. Dalam sebuah studi klasik, cara pencapaian tujuan konflik dibagi menjadi tiga yakni pertarungan, pertandingan dan perdebatan. Pertarungan cenderung melihat bahwa pihak lain adalah musuh dan harus dihancurkan. Sedangkan pertandingan lebih melihat bahwa pihak lain adalah lawan dan berusaha untuk mengguguli. Sedangkan pada fase perdebatan melihat melihat bahwa pihak lain adalah lawan dan berusaha untuk mempengaruhi. Fase debat dan pertarungan merupakan fase *Manifest Conflict Process* sedangkan pertarungan masuk dalam fase

*Aggressive Manifest Conflict Process*. Pihak ketiga, dalam penyelesaian konflik haruslah mampu merumuskan sebuah pencegahan dari konflik kekerasan melalui pendekatan tersebut.

Dalam sebuah konflik, pihak yang berkonflik biasanya memiliki argumentasi dasar mengenai persaingan, menghindari, akomodasi, kompromi, dan kerjasama. Penanganan konflik dijelaskan dalam dua jalan yakni dalam bentuk kompetitif dan kooperatif. Kompetitif lebih membentuk pola *realpolitics* atau politik yang sebenarnya dimana konflik merupakan bentuk persaingan. Sedangkan kooperatif dapat diasumsikan sebagai *idealpolitics* yang berasumsi pada keadilan sosial untuk semua pihak. Pihak ketiga dalam penyelesaian konflik yang berada pada segmen AMCPs haruslah mampu menemukan pihak berkonflik yang memiliki orientasi kooperatif dalam penyelesaian konflik guna mentransformasi konflik dari AMCPs menuju MCPs.

Dilihat dari lingkungan konflik, akan ada dua pendekatan yakni endogen dan eksogen. Endogen dalam artian sederhana adalah kekuatan yang berasal dari dalam. Pada konteks lingkungan konflik endogen didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang mungkin untuk mengontrol dan menyelesaikan konflik. Sedangkan eksogen dianggap sebagai kekuatan luar yang mampu merepresentasikan sebuah kondisi politik yang sebenarnya dalam tatanan internasional. Faktor eksogen diartikan sebagai sebuah kekuatan luar yang masuk kedalam konflik yang sedang terjadi.

#### **b. Pilar 2: Penyebab konflik dan kondisi**

Penyebab dan kondisi konflik dapat dilihat dari sisi kompleksitas sebuah konflik. Konflik dilihat dari seberapa besar atau kecil kompleksitas yang terjadi di dalam konflik tersebut. Konflik yang sederhana digambarkan dengan perebutan sebuah mainan oleh dua anak. Dalam konflik yang sederhana ini, bisa ditemukan sebuah jalan keluar dengan menghadirkan mainan yang memiliki nilai yang sama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Konflik ini dikategorikan sebagai konflik yang kompleksitas rendah dan penyelesaiannya dianggap sederhana. Kondisi ini akan menjadi berbeda ketika dihadapkan pada konflik yang memiliki kompleksitas tinggi seperti konflik wilayah, ras, etnik dan lain sebagainya.

Dalam konflik, harus dipahami lebih dalam mengenai keterhubungan antara tipe/ level konflik tersebut. Hal ini akan menuntun peneliti untuk melihat penyebab konflik dan kondisi yang ada berdasarkan keterhubungan dari tipe/level konflik

tersebut. Setelah memahami mengenai penyebab dan kondisi yang ada serta level dan tipe konflik, akan sangat membantu dalam menentukan intervensi yang dibangun dalam penyelesaian konflik tersebut.

**c. Pilar 3: *Conflict Intervention*.**

Bagian ini lebih menjelaskan mengenai bagaimana proses intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Merujuk pada agenda PBB mengenai perdamaian dalam formulasi pembentukan perdamaian “An Agenda for Peace 1992”. Dipaparkan mengenai tahapan dalam penyelesaian konflik. Ada empat tahapan konflik yang dijelaskan antara lain:

1. *Preventive diplomacy* : Pencegahan konflik kekerasan
2. *Peace making* : *Conflict settlement* dan *conflict resolution*
3. *Peace keeping* : *Conflict management*
4. *Peace building* : *Conflict transformation*

Empat komponen tersebut merupakan sebuah keterhubungan dalam proses penyelesaian konflik hingga membentuk sebuah stabilitas kondisi. Kondisi awal dibentuk untuk menghindari konflik kekerasan yang ada didalam situasi konflik. Jika tetap terjadi konflik kekerasan, maka dibentuk *peace making* dengan membentuk sebuah resolusi dalam konflik tersebut. Setelah terbentuk sebuah resolusi, maka penjagaan terhadap kondisi yang diresolusikan tersebut dijaga dengan baik. Konteks ini dimasukan dalam proses *peace keeping*. Pada bagian akhir, *peacebuilding* adalah fase terbaik dimana konflik sudah mulai ditransformasi menjadi kondisi yang aman.

### **3.2 Teori *Peacebuilding***

Konsep *Peacebuilding* dibangun dari pemikiran Galtung yang berasumsi bahwa *Peacebuilding* sebagai suatu komponen dari strategi resolusi konflik yang di dalamnya terdapat *peacekeeping*, *peacemaking* dan kepercayaan bahwa akan membentuk pendekatan yang assosiatif yang memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur perdamaian yang lebih baik. Galtung percaya bahwa dibutuhkan berbagai macam bentuk untuk *peacebuilding* yang tidak serta merta bisa mengandalkan negara sebagai aktor utama (Ryan, 2013).

Dalam pandangan Johan Galtung, *peacebuilding* didefinisikan guna membangun struktur dan budaya yang damai dalam satu bentuk masyarakat yang ada

(Galtung, 1969). Jika dalam masyarakat memiliki sebuah mekanisme penyelesaian konflik yang ada, maka masyarakat akan menjadi baik walaupun hadirnya provokasi, ujaran kebencian, dll, masyarakat akan tetap damai jika struktur dan budaya yang dibentuk sudah baik. Bagi Galtung dibutuhkan cadangan alasan untuk tetap menjaga damai agar tetap terjadi. Misalnya kedekatan yang terjadi di antara para aktor yang berada dalam ruang lingkup yang ada. Sedangkan dalam definisi yang berbeda, *peacebuilding* diartikan sebagai proses, pendekatan, dan tahapan yang dibutuhkan untuk mentransformasi konflik ke arah yang berkelanjutan dan membentuk hubungan yang damai (Lederach, 1997).

Peacebuilding dapat dibentuk dalam berbagai sektor untuk menciptakan damai yang berkelanjutan. Salah satu sektor yang dapat digunakan dalam pembangunan damai ini adalah melalui pendidikan. Patricia A. Maulden dalam penelitiannya yang berjudul *Education and Learning* mengungkapkan bahwa pembentukan damai pasca konflik dan kekerasan harus mengubah level pelaksanaan. Pendekatan pada level individu menjadi penting dalam membentuk, mempertahankan dan menjadikan kondisi damai yang berkelanjutan. Selain mengubah level pendekatan dalam perubahan pola pembentukan damai, Maulden memaparkan bahwa sektor pendidikan haruslah mengambil peran besar dalam pembentukan damai yang dimaksud. Pendekatan pada level individu akan membentuk pola damai dengan strategi yang *bottom-up* bukan lagi pada *tatanan top-down*. Ada dua sektor yang dikaji oleh Maulden dalam menghadirkan pendekatan pendidikan pada kajian bina damai. Dua sektor ini meliputi sektor pendidikan formal dan sektor pendidikan informal. Pada pendidikan formal yang rutin, transformasi ke arah damai dapat terus dibentuk dengan melakukan sosialisasi dan penanaman nilai perdamaian, pembentukan inklusivitas, peningkatan nilai-nilai sosial dan menghadirkan gambaran mengenai masa depan yang baik. Pendidikan formal juga harus mampu menghadirkan model sikap, nilai, kepercayaan dan etika yang dapat digunakan serta diadopsi untuk menciptakan damai serta lingkungan yang positif (Maulden, 2013).

Pendidikan informal atau nonformal juga dapat dijadikan sebagai sektor pendukung dalam terciptanya proses bina damai. Pendidikan informal yang dapat dihadirkan meliputi seminar, lokakarya, pelatihan mentoring, budaya literasi, dll. Pendekatan pada sektor ini juga diharapkan mampu didasarkan pada pengetahuan

dan nilai tradisional dan adat yang berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dibentuk pola yang memang menjadi pendekatan paling efektif untuk memperlambat dan membentuk keterikatan yang kuat pascakonflik. Kedua pendekatan ini diharapkan mampu menekankan pada pendidikan damai atau *peace education* sebagai media dalam membentuk bina damai melalui pendidikan pada level individu dengan menerapkan pola dan nilai damai dalam tiap representasi kegiatan. Hal ini dirasa sangat masif perubahannya jika dilakukan secara maksimal karena transformasi yang terbentuk adalah transformasi dari diri individu yang membentuk pola kolektif yang kuat atas kesamaan asumsi dan perspektif terkait nilai damai (Maulden, 2013).

Dalam literatur yang berbeda, yang ditulis oleh Stephen Ryan dalam bukunya yang berjudul *The Transformation of violent intercommunal conflict* menyebutkan bahwa pola konflik komunal yang terus terjadi tidak dapat dilepaskan dari pola pendidikan yang sentimental. Sentimental sendiri adalah pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu. Hal inilah yang kemudian membangun pola konflik komunal yang terus menerus terjadi. Perubahan pola pendidikan yang didasarkan bukan pada ras sentimentil adalah kunci dalam melakukan transformasi konflik yang terjadi dalam lingkup komunal. Pembangunan pemahaman yang didasarkan pada logika dan perasaan menjadi hal yang perlu dibangun untuk membentuk karakter yang damai bagi individu dalam tatanan pendidikan yang dijalankan (Ryan, 2007).

Literatur lain terkait bina damai dalam konteks pendidikan dihadirkan oleh Kathy Bickmore dalam tulisannya yang berjudul *Peacebuilding dialogue as democratic education*. Tulisan ini menekankan pada pola pendidikan yang demokratis menjadi sebuah kunci dalam pemebentukan bina damai melalui dialog. Pola pendidikan yang demokratis dengan mengedepankan kesamaan hak dalam sistem pendidikan menjadi landasan utama dalam membentuk bina damai yang ada di tatanan pendidikan. Bickmore mengajak kita untuk mengulas kembali pemahaman mengenai pola konflik sebelum membentuk sebuah jawaban dari persoalan pendidikan dan bina damai (Bickmore, 2012).

Berangkat dari asumsi Galtung, yang perlu dipahami dari sebuah kondisi konflik adalah *Cycle of conflict* yang dibagi dalam tiga bentuk meliputi *before harm*, *during management of conflict* dan *after harm* (Galtung, 1969). Kondisi ini menjadi

landasan dasar guna menemukan formulasi yang sesuai dalam bidang pendidikan untuk membentuk pola bina damai. Kondisi yang dipaparkan dari asumsi diatas haruslah membentuk pola dialog konflik di sekolah dengan mendengarkan dan bertukar pendapat dari para kelompok yang berkonflik agar dapat ditelusuri apa yang menjadi dasar konflik tersebut hadir dan berkembang hingga membentuk kekerasan.

Lebih lanjut, Bickmore (2012) bahwa menjelaskan penanaman nilai *interpersonal peacemaking* juga harus ditumbuhkan agar secara persolan peserta didik mampu membentuk damai antar kelompok dengan pemahaman dialog konflik sebelum mengarah pada kekerasan. Pendidikan konflik juga perlu dimasukkan dalam kurikulum akademik untuk membentuk pola pendidikan yang damai. Kurikulum ini meliputi pemahaman pedagogi bagi peserta didik terhadap isu yang kontroversional dan sensitif di kelas serta isu-isu yang menjadi sangat *cross-cutting* yang sering kali memudahkan eskalasi konflik menjadi kekerasan.

### 3.3 Roadmap (Peta Jalan) Penelitian

Terkait dengan penelitian dalam kajian konflik dan humanitarian, sebelumnya telah dilakukan beberapa kajian pendahuluan. Penelitian yang telah dilakukan terkait kerjasama pembangunan internasional dalam isu bencana dapat dilihat pada aporan penelitian Anita Afriani dari tahun 2013-2019. Berangkat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh pengusul, akan dilakukan penelitian terkait *school peacebuilding* di sekolah. Lebih lanjut bisa dilihat pada peta jalan/ road map penelitian di pada Tabel 2.

**Tabel 2. Peta Jalan (Road Map) Penelitian**

2013: Aspek Humanitarian dalam Tata Kelola Bencana, Studi Kasus Gempa Sumatera Barat 2009	2016: Analisis Kebijakan Luar Negeri <i>One Door Policy</i> Indonesia Terhadap Bantuan Kemanusiaan Internasional	2019: Bencana dan Manajemen Bencana: Sebuah Tinjauan Konseptual
2014: Humanitarianisme dan Akuntabilitas NGO: Kasus dalam Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat	2017: Eksistensi Kearifan Lokal dalam Implementasi Bantuan Luar Negeri Bank Dunia Melalui PNPM Mandiri Pasca Bencana di	<b>2020 (Penelitian yang akan dilaksanakan): Praktek School Peacebuilding pada SMA/ SMK di kota</b>



	Sumatera Barat	Padang
2015: Pemetaan Modal Sosial Internasional Pasca Bencana di Kota Padang	2018: Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Di Antara Teori Dan Praktis	<b>2021 (Penelitian yang direncanakan): Pengembangan Model Manajemen Konflik berbasis Sekolah pada SMA/ SMK di kota Padang</b>

Sumber: Olahan Peneliti (2020)

## **BAB 4. METODE PENELITIAN**

### **4.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan didisain berupa penelitian studi kasus. Unit analisis penelitian ini adalah civitas akademika SMA/ SMK di Kota Padang. Disain riset seperti ini bermanfaat untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang diteliti melihat masalah tersebut (Moleong; 2000, 3). Penelitian ini lebih mengutamakan kualitas data yang diperoleh karena yang akan diteliti merupakan data analisis dari penyampaian informan terkait dengan masalah ini dan data-data yang diperoleh melalui media primer dan sekunder.

### **4.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indept interview*) langsung dari subyek atau informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pihak yang terkait dan terlibat langsung terkait dengan permasalahan penelitian seperti masyarakat dan pemerintah. Selain wawancara, informasi akan diperoleh melalui teknik kuesioner. Sementara itu data sekunder akan ditelusuri dengan studi dokumentasi yang terkait dengan topik penelitian.

### 4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Data penelitian akan dikumpulkan melalui teknik wawancara khususnya wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang memahami fakta yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu civitas akademika sekolah seperti guru, murid, pengelola sekolah dan komite sekolah sebagai forum orangtua/wali murid serta pemangku kepentingan terkait dengan isu penelitian seperti Selain civitas sekolah, wawancara akan dilakukan terhadap unsur pemerintah terkait seperti dinas pendidikan kota/ provinsi serta masyarakat di sekitar lokasi sekolah. Wawancara akan dilakukan dengan dua metode yaitu metode terstruktur, dimana wawancara dilaksanakan berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun di dalam penelitian. Untuk melengkapi data penelitian, wawancara juga dilaksanakan dengan metode tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas dan tidak terikat dengan panduan wawancara namun tetap fokus pada masalah penelitian yang diteliti.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi terhadap dokumen lembaga yang terkait dengan pengelolaan konflik berbasis sekolah antara kurikulum, peraturan-peraturan sekolah dan SOP-SOP terkait.

c. Teknik Kuesioner

Teknik kuesioner ini dilakukan untuk mendapatkan data-data penelitian berupa persepsi, sikap, dan perilaku responden penelitian yang bersumber dari civitas sekolah, dinas-dinas terkait serta masyarakat.

### 4.4 Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data secara maksimal peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (informasi). Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2002: 178), yang dapat dicapai dengan membandingkan antara satu dokumen dengan

dokumen lainnya. Triangulasi akan dilakukan dengan membanding hasil wawancara, observasi di lapangan, kuesioner dan studi dokumentasi.

Analisis yang dihasilkan dalam penelitian merupakan analisis yang bersumber dari data informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etic*). Dalam penelitian tersebut, data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dipilah-pilah dan diinterpretasikan oleh peneliti sehingga tergambar sebuah realita empiris. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses identifikasi dan pencarian pola-pola umum antar kelompok data<sup>1</sup>.

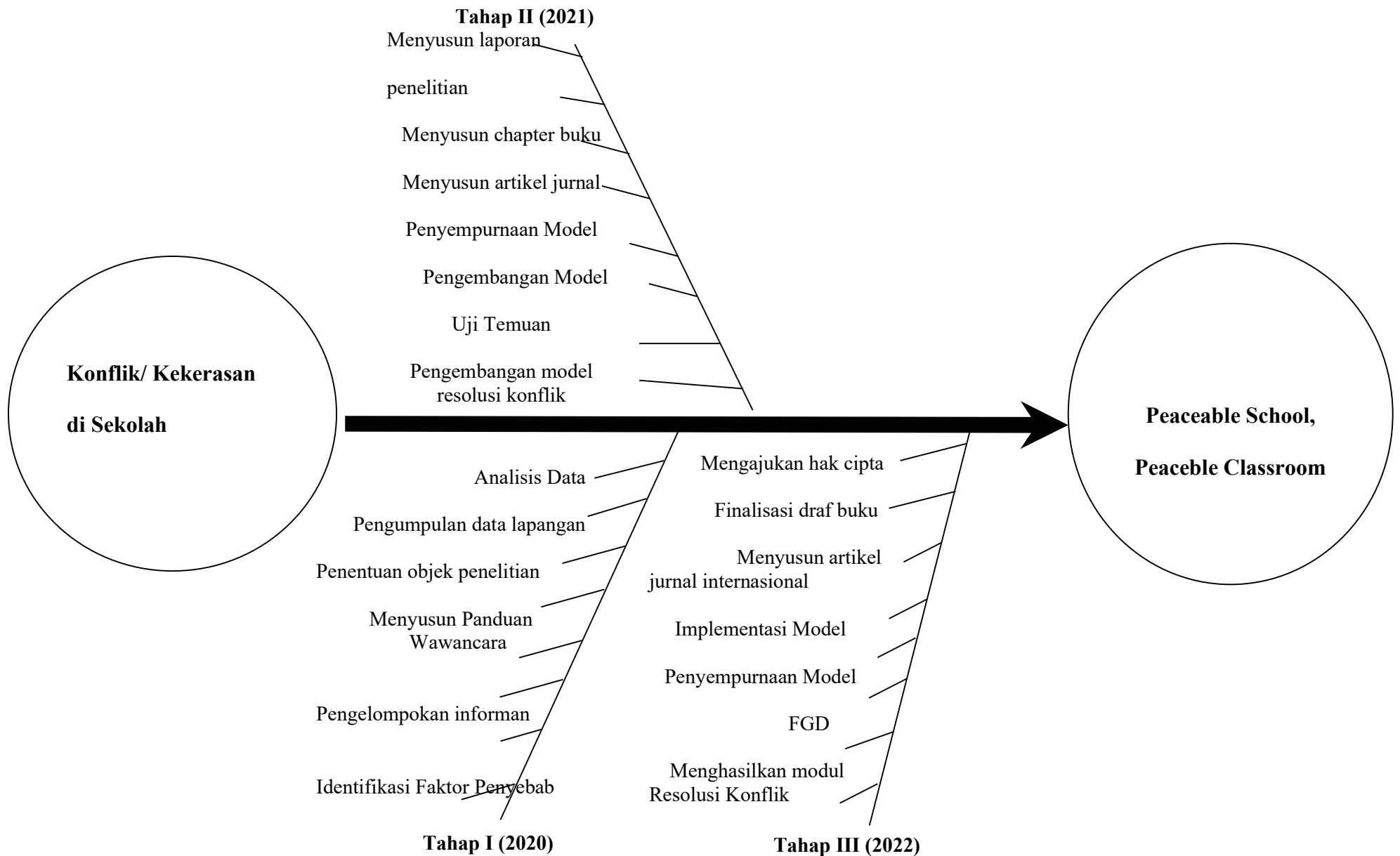
#### **4.5 Lokasi Penelitian dan Informan**

Untuk memperoleh kedalaman dan keberagaman data yang dibutuhkan dalam penelitian, diperlukan pembatasan lokasi penelitian dan pemilihan informan yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian akan dilakukan di beberapa sekolah khususnya sekolah yang sering mengalami konflik yang berujung pada kekerasan.

Lebih lanjut, alur penelitian dapat dilihat dalam bentuk diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) pada Gambar 2.

---

<sup>1</sup>Catherine Marshall dan Dretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (California: Sage Publication Inc, 1999), hal 150



**Gambar 2. Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*) Penelitian**

## **BAB 5 MODEL MANAJEMEN KONFLIK BERBASIS SEKOLAH DI KOTA PADANG**

### **5.1. Sekolah sebagai Agen Perdamaian**

Idealnya sekolah adalah tempat bertemunya murid, guru, staf sekolah dan dilaksanakannya proses pembelajaran dalam kondisi damai serta tanpa kekerasan. Namun konflik adalah sebuah kejadian yang alamiah dan tidak dapat dihindari di mana pun termasuk sekolah. Konflik di sekolah dapat melibatkan murid-murid, murid-guru, guru-guru, guru-staf sekolah, guru/ staf sekolah-yayasan bahkan dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Konflik dapat bersifat konstruktif dan destruktif. Yang paling penting dari pengelolaan konflik adalah agar konflik tidak berubah menjadi konstruktif dalam bentuk kekerasan.

Konflik dan kekerasan adalah dua hal yang mirip tapi sesungguhnya berbeda. Konflik sendiri adalah sebuah ketimpangan kondisi atau ketidaksesuaian satu sama lain baik dalam pola pikir maupun tindakan, sementara itu kekerasan merupakan tahapan ketika konflik tidak mampu dikendalikan dengan baik. Konflik selanjutnya didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditandai dengan tahapan inisiasi, eskalasi, controlled maintenance, de-eskalasi. Berdasarkan definisi tersebut, konflik dibedakan menjadi tiga antara lain *laten conflicts (Pr-MCPs)*, *manifest conflicts process (MCPs)* dan *agressives manifest conflict process (AMCPs)*. Sandole (2003) menterjemahkan *latent conflicts* sebagai konflik yang sedang berkembang namun belum terungkap dengan cara yang dapat diamati bahkan oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik itu sendiri. *Manifest conflicts process* adalah konflik yang sedang berkembang dan telah bisa diamati namun belum pada tahapan adanya kekerasan. Sementara *agressives manifest conflict process* adalah konflik yang telah dieskalasi dari MCPs menuju adanya tingkat kekerasan di dalam konflik.

Pemahaman mengenai tipe konflik membantu dalam menentukan intervensi yang bisa dibangun dalam penyelesaian konflik tersebut. Merujuk pada agenda PBB mengenai perdamaian dalam formulasi pembentukan perdamaian yang disebut dengan An Agenda for Peace 1992 dijelaskan empat tahapan penyelesaian konflik yaitu *preventive diplomacy*, *peace making*, *peace keeping* dan *peace building*. Empat komponen tersebut merupakan sebuah keterhubungan

dalam proses penyelesaian konflik. Diplomasi preventif dibentuk untuk menghindari konflik kekerasan yang ada di dalam konflik. Jika kekerasan masih terjadi, maka tindakan selanjutnya adalah *peace making* dengan membentuk sebuah resolusi dalam konflik tersebut. Setelah resolusi konflik, maka penjagaan terhadap kondisi yang diresolusikan tersebut dijaga dengan baik. Konteks ini termasuk dalam proses *peace keeping*. Pada tahapan terakhir, *peacebuilding* adalah fase tertinggi di mana konflik sudah bertransformasi menjadi kondisi yang aman.

*Peacebuilding* dapat dibentuk melalui berbagai sektor untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, salah satunya melalui pendidikan. Maulden (2019) menjelaskan bahwa pembentukan damai pasca konflik dan kekerasan harus mengubah tingkat/ level pendekatannya. Pendekatan pada level individu menjadi penting dalam membentuk, mempertahankan dan menjadikan kondisi damai yang berkelanjutan. Pendekatan pada level individu akan membentuk pola damai dengan strategi *bottom-up* bukan *top-down*. Maulden juga menjelaskan bahwa sektor pendidikan haruslah mengambil peran besar dalam pembentukan perdamaian baik melalui sektor pendidikan formal dan informal. Pada pendidikan formal, transformasi ke arah damai dapat terus dibentuk dengan melakukan sosialisasi dan penanaman nilai perdamaian, pembentukan inklusivitas, peningkatan nilai-nilai sosial dan menghadirkan pandangan mengenai masa depan yang baik. Pendidikan formal juga mampu menghadirkan model sikap, nilai, kepercayaan, dan etika yang dapat digunakan serta diadopsi untuk menciptakan damai serta lingkungan yang positif. Sementara itu pendidikan informal/ non-formal dapat dijadikan sebagai sektor pendukung dalam terciptanya proses bina damai antara lain meliputi seminar, lokakarya, pelatihan mentoring, budaya literasi dan lain-lain. Pendekatan pada sektor ini didasarkan pada pengetahuan dan nilai tradisional serta adat yang berkembang dalam masyarakat. Kedua pendekatan diharapkan mampu menekankan pada pendidikan damai sebagai media dalam membentuk bina damai dalam tiap representasi kegiatan. Transformasi dari diri individu yang membentuk pola kolektif yang kuat atas kesamaan asumsi dan perspektif terkait nilai damai (Maulden, 2013).

Dalam menjelaskan relasi antara bina damai dan pendidikan, Stephen Ryan (2007) menyebutkan bahwa konflik komunal yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari pola pendidikan yang memiliki unsur sentimental. Sentimental sendiri adalah pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu. Pola pendidikan yang tidak didasarkan pada rasa sentimental adalah kunci dalam melakukan transformasi konflik yang terjadi dalam lingkup komunal. Pembangunan pemahaman yang didasarkan pada logika dan perasaan menjadi hal yang perlu dibangun untuk membentuk karakter yang damai bagi individu dalam tatanan pendidikan yang dijalankan. Berbeda dengan Ryan (2007) yang memberikan tekanan pada hal-hal yang bersifat sentimental, Kathy Bickmore (2012) menekankan pola pendidikan yang demokratis sebagai kunci dalam pembentukan bina damai melalui dialog. Pola pendidikan demokratis mengedepankan kesamaan hak dalam sistem pendidikan menjadi landasan utama dalam pembentukan bina damai dalam dunia pendidikan. Bickmore lebih dalam mengulas kembali pemahaman mengenai pola konflik sebelum menyusun jawaban dari masalah pendidikan dan bina damai.

Kathy Bickmore (2011, hal 40-44) menjelaskan tiga tahapan dalam mewujudkan demokrasi dalam pembelajaran di sekolah yaitu:

Pertama, *peacekeeping* merupakan bentuk intervensi yang berfokus terhadap pengendalian perilaku agresif, mendorong siswa untuk tunduk dan patuh terhadap otoritas yang berlaku.

Kedua, *peacemaking* lebih fokus terhadap penyelesaian masalah yang dapat memandu siswa untuk bersuara berdasarkan kebutuhan dan pandangan mereka, mendengarkan siswa lain, dan mencari solusi dengan negosiasi.

Ketiga, *peacebuilding* merujuk kepada sistem yang komprehensif, jangka panjang, dan beragam untuk mencegah dan mengatasi konflik yang berdampak buruk melalui perubahan sosial.

Bickmore menambahkan penjelasan bahwa sistem dan fasilitas sekolah dalam hal ini memiliki peran dalam mengajarkan materi kewarganegaraan, tidak hanya melalui pembelajaran formal tetapi juga informal.

Negara yang sedang dalam masa konflik dan kekerasan akan memiliki kondisi yang berbeda dengan negara pasca konflik. Negara atau masyarakat pasca

konflik cenderung telah mencapai perdamaian, tetapi rentan untuk menjadi wilayah yang diwarnai kekerasan lagi. Contoh dari negara tipe ini ialah Kamboja, Bangladesh, Kolombia, Peru, dan beberapa negara lainnya. Negara berkembang yang terkena konflik internal atau pasca konflik juga dikategorikan sebagai *Fragile State*, yang mana pemerintah tidak dapat menyediakan fungsi-fungsi yang diharapkan masyarakat. Kondisi ini memberikan dampak yang luas termasuk terhadap dunia pendidikan. Konflik telah menghancurkan sekolah, sehingga anak-anak di negara-negara berkonflik cenderung tidak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan. Bahkan, anak-anak pun tak jarang malah menjadi korban dari konflik. Negara yang rentan untuk terjadinya konflik kembali akan mengalami kesulitan untuk membangun kembali sekolah untuk anak-anak. Selain menjadi korban kekerasan, sekolah juga berpotensi berkontribusi dalam kekerasan. Alih-alih membantu membangun perdamaian berkelanjutan dan menghindari kekerasan di masa depan dalam masyarakat pasca konflik, ketimpangan akses di sekolah malah dapat memicu kekerasan selanjutnya. Kebiasaan dan praktik di sekolah itu sendiri dapat menciptakan kembali kekerasan seperti adanya perkelahian, hukuman, dan pelecehan (Harber, 2019 hal 1-24).

Dalam penelitiannya di tiga sekolah di *urban school studies* di Kanada, Bickmore (2011) menemukan dalam menjalankan strategi *peacekeeping*, sekolah mengontrol konflik sekolah berfokus kepada *anti-disruption* dan *anti-bullying*. Sementara itu, strategi *peacemaking* dibentuk melalui dialog, negosiasi dan mediasi yang sering melibatkan pihak ketiga, dalam wilayah penelitian, Bickmore menemukan proses ini difasilitasi oleh orang dewasa, tutor mediasi teman sebaya, konferensi yang diadakan oleh siswa, dan lingkaran-lingkaran yang membahas mengenai perdamaian. Terakhir, tahapan *peacebuilding* diinstitusionalisasi di sekolah menjadi sebuah kurikulum formal, dimana pengajar dapat mengarahkan pembahasan kelas mengenai anti-diskriminasi dan lain sebagainya.

Sekolah demokratis telah membuat komitmen yang jelas dan eksplisit dalam nilai-nilai demokrasi. Hal ini diwujudkan dengan relasi antara pengajar dan pelajar yang memiliki kebebasan untuk membahas suatu hal yang masih berhubungan dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini, pengajar, pelajar, dan



staf diharapkan memiliki kapabilitas untuk berbicara, mendengar, mengorganisasi, merencanakan, serta meresolusi konflik (Harber, 2019: hal 49-72).

## **5.2. Pengalaman Konflik Sekolah di Kota Padang**

Konflik tidak dapat dihindarkan sehingga harus dikelola agar keadaan menjadi lebih baik, agar konflik tersebut tidak mengalami eskalasi dan menjadi konflik terbuka. Untuk dapat menentukan strategi pengelolaan konflik yang terjadi di sekolah maka diperlukan upaya pemetaan dan penaksiran konflik. Pada bagian ini, sekolah mengidentifikasi berbagai konflik yang terjadi di sekolah. Konflik yang terjadi bisa terjadi antara murid-murid, guru-guru, murid-guru, atau sekolah-masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Berbagai konflik yang terjadi di lingkungan sekolah dapat terjadi di dalam kelas, di halaman, di lapangan olahraga, di kantin dan lain-lain. Hingga saat ini, tidak sedikit media yang menginformasikan bentuk-bentuk perilaku agresif dalam dunia pendidikan, baik antar siswa, siswa dengan guru, guru dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Perilaku tersebut juga ditemukan di kota Padang meskipun pada tahun 2010 dijuduli sebagai Kota Pendidikan Dunia pada pertemuan Dewan Pakar Pendidikan di Seattle, Amerika Serikat.

Selanjutnya pada tahun 2016 misalnya, portal berita Sumbar Today menginformasikan sebuah peristiwa pengeroyokan terhadap salah satu siswa SMAN 2 Kota Padang yang terjadi pada saat mengikuti acara perkemahan di belakang Istano Basa Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar. Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sekelompok kakak kelasnya sendiri yang diduga merasa tidak senang atas kepribadian korban yang sangat akrab dengan banyak kakak kelas perempuan di sekolah tersebut. Korban menerima pukulan dan hantaman dari sekelompok kakak kelas yang berjumlah sekitar dua puluhan. Disamping itu, saat kejadian berlangsung terdapat delapan orang guru yang melihat kejadian tersebut dan tidak melakukan apa-apa pada awalnya, hingga korban diseret sampai ke bawah tebing barulah guru-guru tersebut mengambil tindakan untuk meleraikan pengeroyokan tersebut. Setelah kejadian tersebut, korban merasa terpuruk dan takut untuk kembali bersekolah. Pada portal berita tersebut juga diberitakan bahwa pihak sekolah lepas tangan dengan mengatakan bahwa peristiwa tersebut

bukanlah pengeroyokan, melainkan hanya kesalah pahaman antara keduanya dan memberikan tidak lanjut berupa mediasi saja. Tindakan pihak sekolah ini dianggap bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pada tahun yang sama, kepolisian kota Padang mengamankan tujuh siswa SMA yang terlibat tawuran di kawasan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur (<https://news.m.klikpositif.com/baca/6918/7-siswa-sma-diamankan-saat-tawuran-di-padang>). Tawuran ini terjadi antar sekolah yang melibatkan siswa dari SMK Kos Goro, SMK Kartika, dan SMK Muhammadiyah. Diketahui pada tawuran tersebut siswa dilengkapi dengan sejumlah senjata seperti *gear* dan ikat pinggang besi. Tawuran ini terjadi di pinggir jalan sekitar tugu Simpang Haru dan mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Tidak hanya itu, pada Januari 2016 Satpol PP Kota Padang juga melaporkan sepanjang tahun 2015 pelajar SMK mendominasi tawuran di kota Padang (<https://news.okezone.com/read/2016/01/21/340/1293345/pelajar-smk-dominasi-tawuran-di-padang>). Tercatat sebanyak 220 diantara 433 kasus tawuran dilakukan oleh siswa SMK. Kepala Satpol PP juga menyebutkan bahwa penyebab tawuran ini karena lemahnya pengawasan dari sekolah terhadap peserta didik. Selain itu, pada tahun 2018, puluhan siswa dari enam sekolah terlibat tawuran di GOR Agus Salim (<https://www.harianhaluan.com/news/detail/71941/dipaksa-alumni-puluhan-pelajar-dari-6-sekolah-tawuran-di-gor-agus-salim>). Siswa-siswa tersebut berasal dari SMA Kos Goro, SMK Muhammadiyah, SMA Kartika, SMK 5, dan PGRI 6. Puluhan siswa tersebut mengaku terlibat kedalam tawuran karena diancam dan dipaksa oleh alumni dari sekolah-sekolah tersebut. Pada tawuran ini, siswa dan alumni tersebut menggunakan senjata tajam berupa samurai dan celurit hingga empat orang siswa menjadi korban.

Tindakan agresif di lingkungan sekolah tidak hanya terjadi antara siswa dengan siswa saja. Pada tahun 2019, Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menerima laporan adanya kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh seorang oknum wakil kepala sekolah kepada seorang siswa di SMAN 10 Kota Padang (<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sumbar-terima-laporan-3-kasus-bully-oleh-guru-pada-siswa>). Berdasarkan keterangan pelapor,

siswa SMAN 10 Kota Padang yang memiliki orang tua yang vokal dalam mengkritisi kebijakan sekolah tentang uang komite sekolah dikumpulkan dan dikasari. Kemudian, pada pertengahan tahun 2020 ini, tindakan agresif tersebut juga terjadi antara orang tua atau masyarakat dengan pihak sekolah terkait proses penerimaan siswa baru. Pada Juli 2020, ratusan orang tua siswa melakukan aksi demonstrasi di depan SMAN 5 Padang (<http://tvrisingbar.co.id/berita/detil/3289/orang-tua-siswa-demo-sma-n-5-padang.html>). Para orang tua ini mengaku kecewa dengan sistem PPDB yang kacau dan dianggap merugikan. Kekecewaan ini juga dipicu dengan kuota penerimaan siswa baru yang terlalu sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat sekitar yang banyak. Para orang tua menyesalkan anak-anak mereka yang tidak dapat bersekolah di daerah sendiri karena pembatasan kuota. Pada demonstrasi tersebut, para orang tua menuntun pihak sekolah agar dapat dipertemukan dengan dinas pendidikan atau yang mewakili untuk menyampaikan suara mereka.

Aksi demo ini ternyata tidak hanya antara orang tua dengan pihak sekolah saja. Pada bulan yang sama, diketahui sejumlah guru swasta juga melakukan demo di Kantor Gubernur Sumatra Barat (<https://regional.kompas.com/read/2020/07/29/15551411/protes-sistem-ppdb-guru-sekolah-swasta-demo-di-kantor-gubernur-sumbar?page=all>). Para guru swasta mempertanyakan kebijakan dinas pendidikan yang membuka pendaftaran untuk sekolah negeri yang terdiri dari dua tahap, yaitu zonasi dan non-zonasi. Kebijakan ini kemudian dianggap mempersulit sekolah swasta dalam merekrut siswa baru. Tindakan agresif akibat proses penerimaan siswa baru ini ternyata juga pernah terjadi pada tahun 2018. Para orang tua bahkan memblokir proses belajar mengajar di SMAN 14 Padang akibat tak terima anaknya tidak diterima di sekolah tersebut (<https://klikpositif.com/baca/35347/anak-tak-diterima-bersekolah--wali-murid-blokir-pbm-di-sman-14-padang>). Para orang tua tersebut melakukan aksi protes dan pihak sekolah 30 menit kemudian menenangkan para orang tua tersebut setelah berkoordinasi dengan dinas pendidikan dalam menyampaikan suara para orang tua tersebut.

Adanya berbagai tindakan agresif yang ditemukan di berbagai sekolah di kota Padang, khususnya sekolah menengah atas atau sederajat menunjukkan bahwa diperlukan perhatian yang lebih baik dari pemerintah, pihak sekolah, maupun masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini baik secara psikologis maupun fisik, banyak sekali alasan-alasan pemicu tindakan agresif tersebut. Secara ringkas, berbagai tindakan agresif tersebut dirangkum dalam tabel 3.

Tabel 3. Konflik dan Kekerasan di SMA sederajat di Kota Padang

No	Jenis Tindakan Agresif	Tahun	Sumber
1.	Tawuran Siswa-Siswa	2015	Pelajar SMK Dominasi Tawuran di Padang.
2.	Kekerasan atau pengeroyokan Siswa-Siswa	2016	Zaki Takut ke Sekolah Sehabis Dikeroyok, Pihak SMAN 02 Lepas Tangan.
3.	Tawuran Siswa-Siswa	2016	7 Siswa SMA Diamankan saat Tawuran di Padang.
4.	Tawuran Siswa-Siswa	2018	Dipaksa Alumni, Puluhan Pelajar dari 6 Sekolah Tawuran di GOR Agus Salim.
5.	Demonstrasi Orang Tua-Sekolah	2018	Anak Tak Diterima Bersekolah, Wali Murid Blokir PBM di SMAN 14 Padang.
6.	Kekerasan Verbal Guru-Siswa	2019	Kabar Perwakilan: Ombudsman Sumbar Terima Laporan 3 Kasus "Bully" oleh Guru pada Siswa.
7.	Demonstrasi Orang Tua-Sekolah	2020	Orang Tua Siswa Demo SMAN 5 Padang.
8.	Demonstrasi Guru Swasta-Gubernur Sumatra Barat	2020	Protes Sistem PPDB, Guru Sekolah Swasta Demo di Kantor Gubernur Sumbar.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Penelitian ini dilakukan di 10 (sepuluh) sekolah menengah atas dan sederajat di kota Padang dengan responden yang mengisi angket kuesioner kurang lebih 300 orang. Selain survei untuk memetakan konflik, dilakukan juga wawancara terhadap 30 orang informan penelitian dari berbagai sekolah yang terdiri dari guru, staf dan siswa. Pada tahapan awal penelitian, dilakukan pemetaan dan penaksiran konflik yang terjadi di sekolah. Serangkaian aktivitas penaksiran konflik yang dijalankan sebagai langkah awal dalam menerapkan strategi resolusi konflik yang disusun oleh masing-masing sekolah. Warga sekolah baik guru, staf dan murid diminta memilih pernyataan yang paling sesuai dengan menggunakan skala likert dengan rentang 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju'. Data pemetaan dan penaksiran konflik di sekolah-sekolah dapat dilihat di tabel 4.

Tabel 4. Pemetaan dan Penaksiran Konflik di SMA sederajat di Kota Padang

No.	Pernyataan	Pilihan survei terbanyak	Murid (%)	Pilihan survei terbanyak	Guru (%)
1	Ada konflik-konflik yang mengganggu proses pembelajaran di sekolah	Kadang-kadang	56,9	Kadang-kadang	55,5
2	Ada suasana tidak toleran di dalam sekolah	Kadang-kadang	43,5	Kadang-kadang	38,8
3	Ada kekurangan di dalam proses menangani konflik di sekolah	Kadang-kadang	43,9	Kadang-kadang	44,4
4	Konflik antar murid adalah masalah di sekolah	Kadang-kadang	37,2	Kadang-kadang	33,3
5	Konflik murid-guru adalah masalah di sekolah	Kadang-kadang	33,47	Kadang-kadang	52,7
6	Konflik guru-guru adalah masalah di sekolah	Setuju	36,8	Kadang-kadang	41,6
7	Konflik guru-yayasan adalah masalah di sekolah	Setuju	38,4	Setuju	36,1
8	Sekolah tidak memiliki prosedur yang cukup untuk mengatasi konflik di sekolah	Setuju	39,7	Setuju	52,7
9	Prosedur resolusi konflik yang ada sekarang berjalan efektif	Kadang-kadang	44,7	Kadang-kadang	36,1
10	Sekolah akan diuntungkan dari program resolusi konflik	Kadang-kadang	30,1	Kadang-kadang	36,1

Sumber: diolah oleh peneliti

### 5.3. Manajemen Konflik berbasis Sekolah di Kota Padang

Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) merupakan sebuah pendekatan yang dapat dilakukan di sekolah dan telah banyak diterapkan di banyak negara. Pendekatan ini merupakan sebuah upaya pencegahan kekerasan dan pembinaan perilaku positif siswa di sekolah. Di Indonesia sendiri, beberapa sekolah pun sudah mulai menerapkannya. Di Indonesia, beberapa sekolah pun sudah mulai menerapkannya. Contohnya adalah sekolah Budi Mulia di Yogyakarta dan Sekolah Sukma Bangsa di Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, walaupun tidak secara formal disebut manajemen konflik berbasis sekolah, ada banyak sekolah yang menggunakan proses belajar-mengajar yang inovatif. Inovasi tersebut mencakup metode pembelajaran yang kolaboratif, manajemen kelas yang melibatkan siswa, dan lain-lain (Panggabean, 2008).

MKBS dijelaskan oleh Crawford dan Bodine (1996) dengan empat pendekatan yaitu kurikulum proses, mediasi, kelas yang damai dan sekolah yang damai. Sementara itu Panggabean dkk (2015) menambahkan dua pendekatan untuk melengkapi ide sebelumnya yaitu antiperundungan (anti-bullying) dan peran keluarga dan masyarakat. Cara-cara di dalam pendekatan MBKS ini dapat digunakan, baik secara terpisah maupun dikombinasikan. Proses penerapan MKBS juga bisa bertahap – tidak harus serta merta, seragam, dan memerlukan surat keputusan menteri atau yang semacamnya (Panggabean, 2008).

Crawford dan Bodines menjelaskan pendekatan “kurikulum proses” pada kurikulum proses, MKBS dilaksanakan dengan menyediakan waktu-waktu khusus di sekolah untuk mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan resolusi konflik kepada guru dan siswa dengan mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan resolusi konflik ke dalam kehidupan guru dan siswa selama di sekolah. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut tidak dijadikan sebagai materi yang harus dipelajari, dihapal dan dilatih sebagai “kurikulum produk” atau “kurikulum hasil” (Knight, 2001) namun menjadi ciri dan bagian dari interaksi serta pengalaman sehari-hari di sekolah sebagai bagian dari ketrampilan hidup dan sosial siswa.

Sekolah memiliki banyak pilihan waktu khusus mempelajari manajemen dan resolusi konflik. Sekolah di kota Padang secara umum mengintegrasikan ketrampilan dan pengetahuan resolusi konflik melalui berbagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan kelas. Program sekolah tentang penanaman nilai-nilai perdamaian baik untuk guru, staf, dan siswa sebagian besar dikelola oleh staf guru bidang Bimbingan Konseling (BK). Guru BK kemudian yang akan memfasilitasi diskusi atau mediasi di antara siswa yang berkonflik. Selain program konseling, sekolah-sekolah di Padang juga memiliki berbagai kegiatan seperti kegiatan kemanusiaan yang dikelola oleh bagian kesiswaan di sekolah. Kegiatan siswa lainnya adalah program Sikap Jujur. Program ini memberikan dampak positif terhadap berbagai dimensi kehidupan siswa baik saat masih berada di sekolah serta diharapkan ketika berada di luar sekolah. Kejujuran diyakini oleh sekolah merupakan investasi sangat berharga dan modal dasar bagi terciptanya komunikasi efektif dan hubungan yang sehat dengan warga sekolah. Kegiatan kesiswaan juga dimiliki oleh sekolah yang berlatar

belakang nilai-nilai Islam yaitu kegiatan Muhadharah. Dalam kegiatan ini ditanamkan nilai-nilai perdamaian kepada siswa melalui muatan lokal Kemuhammadiyah. Terhadap guru, khususnya pada sekolah-sekolah dengan latar belakang Islam diadakan pengajian dan Darma Wanita.

Program MBKS selanjutnya adalah program mediasi. Mediasi adalah perundingan dengan bantuan pihak ketiga. Pada program ini, sejumlah siswa dilatih mengenai prinsip dan kemampuan dasar mediasi, dengan meminta bantuan dari mediator yang sudah terlatih. Mediator membantu dua siswa yang berkonflik mengikuti sesi mediasi. Mediasi dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan alternatif terhadap praktik tradisional seperti skorsing dan hukuman fisik. Salah satu program mediasi adalah mediasi sejawat atau *peer mediation* dimana baik pihak yang berkonflik maupun mediatornya adalah siswa. Siswa lain memberikan bantuan sebagai penengah untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan dua siswa yang berkonflik. Di akhir proses ini dihasilkan kesepakatan damai tertulis. Dalam kegiatan ini, guru bertindak sebagai koordinator yang menyiapkan sesi mediasi antara siswa penengah dengan siswa pelaku konflik. Guru atau coordinator mediasi menentukan perselisihan atau konflik apa saja yang ditangani dengan mediasi.

Komponen selanjutnya dalam MKBS adalah kelas yang damai/ *peaceable classroom*. Kelas yang damai berasal dari tradisi bekerja sama salah satunya melalui proses pembelajaran (*collaborative learning*) (Slavin, 2014) dan manajemen kelas nirpaksa (*non-coercive classroom management*). Noel (2008) juga menyebutkan bahwa belajar kolaboratif dan manajemen kelas nirpaksa sebagai dua pilar pendidikan resolusi konflik. Kelas yang damai menghindari beberapa proses pembelajaran yang bersifat negatif, yaitu suasana yang otokratis, serba menghukum, menggunakan kekerasan fisik, dan menekankan kontrol eksternal. Kelas yang damai fokus pada komunikasi dan interaksi nirkekerasan dan pembinaan kemampuan dasar di bidang pemecahan masalah.

Pembelajaran kolaboratif dan manajemen kelas nirpaksa dapat mengintegrasikan pendidikan resolusi konflik ke dalam mata pelajaran yang ada. Misalnya ketika mengikuti pelajaran Sejarah, siswa dapat mendiskusikan keberhasilan dan kegagalan negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan

Belanda pada masa perang kemerdekaan. Siswa juga dapat mengkaji tokoh dan sumbangsuhnya bagi perdamaian dari Mahatma Gandhi, Abdul Gaffar Khan, Nelson Mandela, Abdurrahman Wahid dan lain sebagainya. Prinsip resolusi konflik bahkan bisa diintegrasikan kepada mata pelajaran yang sepertinya tidak berkaitan dengan perdamaian dan resolusi konflik. Misalnya dalam pelajaran olah raga, siswa dapat diajak mendiskusikan beda permainan yang bersifat kompetitif dari permainan yang kolaboratif, yang dapat menghambat atau menopang sportivitas dalam berolahraga.

Konflik di lingkungan sekolah, baik yang melibatkan siswa, guru dan staf, dipandang sebagai sumber masalah yang menimbulkan rasa takut, kecemasan, ketidakamanan, dan sikap membela diri. Pendekatan dari sekolah-sekolah yang memandang semua konflik adalah negatif dan destruktif ini disebut sebagai “sekolah konflik negatif”. Berbeda dengan cara pandang pendekatan sebelumnya, pendekatan sekolah yang damai (*peaceable school*) menjadikan seluruh sekolah sebagai fokus pendidikan perdamaian dan resolusi konflik (Crawford dan Bodine 1996 hal 39).

Sekolah yang damai mengintegrasikan pendidikan resolusi konflik ke dalam operasional sekolah meliputi usaha-usaha menciptakan lingkungan belajar bersama, praktik keterampilan resolusi konflik secara langsung, sistem sekolah yang nirpaksa dan nirintimidasi, integrasi konsep dan keterampilan resolusi konflik ke dalam kurikulum sekolah, termasuk budaya sekolah. Semua warga sekolah menerapkan keterampilan manajemen konflik untuk mengatasi masalah interpersonal dan intergrup dan masalah-masalah yang dihadapi, siswa, guru, administrasi, dan orang tua. Selain itu, sekolah menyediakan pelatihan di bidang pemecahan masalah, negosiasi dan mediasi. Sekolah yang damai menggabungkan pendekatan kurikulum proses, mediasi, dan kelas yang damai.

Lebih lanjut MBKS menangani masalah perundungan. Perundungan merupakan tindakan negatif yang dilakukan siswa atau beberapa siswa terhadap siswa atau beberapa siswa lain secara berulang dan dalam waktu relatif lama. Perundungan terjadi dalam hubungan antarsiswa yang ditandai ketimpangan kekuatan dan biasanya tindakan tersebut terjadi tanpa ada provokasi dari korban. Pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan perundungan adalah pelaku sebagai



aktor utama, korban, dan penonton. Pada akhirnya, perundungan menimbulkan dampak negatif terhadap siswa dan mengganggu kedamaian di sekolah.

MKBS menangani masalah perundungan dengan berbagai cara diantaranya memfasilitasi korban dan penonton supaya melaporkan insiden perundungan. Pendekatan kelas yang damai menjadikan kelas sebagai tempat belajar yang aman. Pendekatan sekolah yang damai menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman bagi semua. Lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik sekolah merupakan sumber suasana aman bagi seluruh warga sekolah khususnya siswa. Akhirnya, sekolah dapat bekerjasama dengan keluarga dan masyarakat mengatasi komunikasi agresif di dalam keluarga dan layanan konsultasi bagi korban perundungan (Panggabean dkk, 2015).

Keberhasilan MKBS di sekolah tidak bisa dilepaskan dari dukungan dan peran serta keluarga dan masyarakat. Masalah atau kekerasan yang terjadi di keluarga dan masyarakat memberikan pengaruh terhadap konflik dan kekerasan di sekolah. Selanjutnya efek pendidikan resolusi konflik di sekolah akan terbatas kalau kondisi di masyarakat tidak kondusif. Sekolah menerapkan kebijakan menolak kekerasan misalnya lewat program menolak kekerasan (*zero tolerance for violence*). Tetapi, program ini tidak akan efektif jika orangtua menggunakan caracara kekerasan terhadap anak-anak di rumah. Semangat toleransi yang dikembangkan di sekolah dapat luntur jika perkampungan tempat anak tinggal sering diwarnai keributan dan perkelahian antarwarga. Perilaku nirkekerasan yang ditanamkan di kelas sulit diinternalisasi murid karena maraknya aneka tayangan televisi, permainan komputer, dan buku bacaan yang sarat kekerasan di lingkungan mereka.

Program resolusi konflik apa pun yang diterapkan sekolah tidak akan berhasil dengan baik jika tidak didukung lingkungan sosial sekolah. Peran masyarakat dalam MKBS tidak hanya dengan menciptakan lingkungan damai dan nirkekerasan. Lebih jauh, masyarakat dapat berperan sebagai nara sumber dalam aneka kegiatan di sekolah. Sekolah dapat merancang kurikulum MKBS yang sesuai bagi sekolah dan masyarakat tempat sekolah berada. Konteks masyarakat, misalnya di pedesaan atau di perkotaan, akan memengaruhi kurikulum yang dikembangkan sekolah di masyarakat tersebut. Begitu pula, variasi masalah atau

isu konflik yang paling sering dihadapi sekolah, mulai dari tawuran, perundungan, sampai penyalahgunaan narkoba, akan menjadi pertimbangan Ketika merancang kurikulum resolusi konflik. Karenanya, pemetaan dan penaksiran konflik (*assessment*) di suatu sekolah perlu dilakukan sebelum menentukan racikan kurikulum resolusi konflik yang akan dilembagakan (Panggabean dkk, 2015).

## **BAB 6 KESIMPULAN**

Proses melembagakan gagasan dan praktik MKBS ke dalam kultur sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar secara keseluruhan, yang melibatkan siswa, guru, serta staf, dan pengurus sekolah. Sekolah di kota Padang secara umum mengintegrasikan ketrampilan dan pengetahuan resolusi konflik melalui berbagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam ruangan kelas. Program sekolah tentang penanaman nilai-nilai perdamaian baik untuk guru, staf, dan siswa sebagian besar dikelola oleh staf guru bidang Bimbingan Konseling (BK). Guru BK kemudian yang akan memfasilitasi diskusi atau mediasi di antara siswa yang berkonflik. Selain program konseling, sekolah-sekolah di Padang juga memiliki berbagai kegiatan seperti kegiatan kemanusiaan yang dikelola oleh bagian kesiswaan di sekolah. Kegiatan siswa lainnya adalah program Sikap Jujur. Program ini memberikan dampak positif terhadap berbagai dimensi kehidupan siswa baik saat masih berada di sekolah serta diharapkan ketika berada di luar sekolah. Kejujuran diyakini oleh sekolah merupakan investasi sangat berharga dan modal dasar bagi terciptanya komunikasi efektif dan hubungan yang sehat dengan warga sekolah. Kegiatan kesiswaan juga dimiliki oleh sekolah yang berlatar belakang nilai-nilai Islam yaitu kegiatan Muhadharah. Dalam kegiatan ini ditanamkan nilai-nilai perdamaian kepada siswa melalui muatan lokal Kemuhammadiyah. Terhadap guru, khususnya pada sekolah-sekolah dengan latar belakang Islamm diadakan pengajian dan Darma Wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusmanto. "7 Siswa SMA Diamankan saat Tawuran di Padang". Klik Positif. (2016). Diakses melalui <https://news.m.klikpositif.com/baca/6918/7-siswa-sma-diamankan-saat-tawuran-di-padang> pada pada 30 November 2020.
- Baedowi dkk, Ahmad (2015). Manajemen Sekolah Efektif, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Bickmore Kathy (2012). Peacebuilding dialogue as democratic education: Conflictual issues, restorative problem-solving, and student diversity in classrooms.
- Crawford, Donna dan Richard Bodine. *Conflict Resolution Education: A Guide to Implementing Programs in Schools, Youth-Serving Organizations, and Community and Juvenile Justice Settings*. US Department of Justice dan US Department of Education, 1996.
- Firawati, Titik (2018). Kemanusiaan, Kedewasaan dan MKBS, Media Indonesia 08 Januari 2018, diakses tanggal 30 Maret 2020
- Galtung, J. (1969). *Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, Vol 6 No.3, SAGE*
- Hadiwinata, Bob Sugeng (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis, Jakarta: Pustaka Obor
- Irwan Santoso. "Orang Tua Siswa Demo SMAN 5 Padang". TVRI Sumbar. (2020). Diakses melalui <http://tvrsumbar.co.id/berita/detil/3289/orang-tua-siswa-demo-sma-n-5-padang.html> pada 30 November 2020.
- Knight, Peter T., "Complexity and Curriculum: A Process Approach to Curriculum-making," *Teaching in Higher Education*, Vol. 6, No. 3, 2001, hal. 369-381.
- Kusumaningrum, Diah (2017). 20 Tahun Studi Perdamaian di HI UGM, IIS Brief Issue 05 September 2017 diakses tanggal 30 Maret 2020
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: sustainable reconciliation in divided societies*. Chicago: United States Institute of Peace
- Maulden, Patricia A. (2013). Education and learning dalam Roger Mac Ginty, ed *Routledge Handbook of Peacebuilding*. New York and London: Routledge.

- Noel, Brett Riley, "Conflict Resolution Education in Indonesia: Mapping Adaptations and Meanings" (Disertasi Universitas Ohio, 2008).
- Panggabean, Samsu Rizal (2008). *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*, Media Indonesia 02 Juni 2008, diakses tanggal 30 Maret 2020
- Panggabean dkk, Samsu Rizal (2015). *Manajemen Konflik Berbasis Sekolah*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Panggabean, Samsu Rizal (2017). *Intitusionalisasi Manajemen Konflik berbasis Sekolah*, Sukma: Jurnal Pendidikan Vol 1 Issue 1.
- Perdana Putra. "*Protes Sistem PPDB, Guru Sekolah Swasta Demo di Kantor Gubernur Sumbar*". Kompas. (2020). Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/07/29/15551411/protes-sistem-ppdb-guru-sekolah-swasta-demo-di-kantor-gubernur-sumbar?page=all> pada 30 November 2020.
- Rus Akbar. "*Pelajar SMK Dominasi Tawuran di Padang*". Okenews. (2016). Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2016/01/21/340/1293345/pelajar-smk-dominasi-tawuran-di-padang> pada 30 November 2020.
- Ryan, Stephen (2007). *The Transformation of Violent Intercommunal Conflict*. Hampshire: Ashgate.
- Ryan, Stephen (2013). *The Evolution of Peacebuilding*, dalam Roger Mac Ginty, ed. *Routledge Handbook of Peacebuilding*. New York: Routledge
- Sandole, D. J. (2003). *Typology*. In S. D. Cheldelin, *Conflict*. London/New York: Continuum.
- Slavin, Robert E., "Cooperative Learning and Academic Achievement: Why Does Groupwork Work?" *Anales de Psicología*, Vol. 30 No. 3, 2014, hal. 785-791.
- \_\_\_\_\_, Harian Haluan. "*Dipaksa Alumni, Puluhan Pelajar dari 6 Sekolah Tawuran di GOR Agus Salim*". (2018). Diakses melalui <https://www.harianhaluan.com/news/detail/71941/dipaksa-alumni-puluhan-pelajar-dari-6-sekolah-tawuran-di-gor-agus-salim> pada 30 November 2020.

\_\_\_\_\_, Kabar Perwakilan: Ombudsman Sumbar Terima Laporan 3 Kasus “Bully” oleh Guru pada Siswa. Ombudsman RI. (2019). Diakses melalui <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sumbar-terima-laporan-3-kasus-bully-oleh-guru-pada-siswa> pada 30 November 2020.